

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH
Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Nugraeni*

ABSTRACT

This study aims to analyze DAU, DAK and PAD associated with local expenditure in the current year, as well as the influence of DAU_{t-1} , DAK_{t-1} and PAD_{t-1} against BD_t with a lag of 1 year. Local expenditure area plays an important role in running the system of government is to increase public welfare and as a form of good governance. The sample used was the Regency / Municipality in Indonesia, which reported regularly Realization Report Regional Budget (APBD) from 2007 until 2009, not divided in the years 2007-2009 as well as receive DAU and DAK. Based on these criteria, the sample used in this study is the 295 Regency / Municipality. The analysis tools are the Pearson correlation (Pearson Product Moment) for the association and the Simple Regression Analysis and Multiple Regression Analysis for the effect. The results prove that DAU, DAK and PAD positive association with the Local expenditure in the current year, and DAU_{t-1} , DAK_{t-1} and PAD_{t-1} is significant factor for predicting the Local expenditure Budgets of local government Regency / Municipality in Indonesia.

Keywords: the General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Regional Income and Local expenditure

Pendahuluan

Amanat dari pembukaan UUD 1945 adalah terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, yang diwujudkan dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa dengan adanya proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

* Nugraeni adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menghadapi kondisi otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi daerah yang mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien yang merupakan unsur belanja daerah.

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun Kabupaten/Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 32/2004 melibatkan dua pihak: *eksekutif* dan *legislatif*, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun *eksekutif* sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Berlakunya Undang-Undang No. 33 tahun 2004, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan

bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan menransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Prakosa, 2004). Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri.

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel (Abdullah dan Halim, 2003).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah

diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD (Adi, 2006).

Berdasarkan penelitian Holtz-Eakin et.al., (1985) Darwanto (2007); Situngkir (2009) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Abdullah & Halim (2003) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Untuk menyusun urusan wajib dan urusan lainnya pemerintah daerah harus memperhatikan pelayanan publik (*public services*) sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ada 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, (Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 13 (1) dan 14 (1)) yang terdiri dari :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteramaan masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertahanan.

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang mempunyai proporsi lebih kecil dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah dan sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Rumusan Masalah

Dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah itu sendiri dan dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Salah satu indikator penting adalah kemampuan dalam bidang keuangan yang tercermin dalam pendapatan. Untuk itu dicari faktor-faktor yang diharapkan mempunyai hubungan dan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan dan pengeluaran pembangunan yang merupakan unsur belanja daerah yaitu DAU, DAK dan PAD. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

*Nugraeni - Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*

1. Apakah DAU, DAK dan PAD berasosiasi dengan Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Apakah DAU, DAK dan PAD merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Studi tentang pengaruh transfer atau *grants* dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar & Oates, 1996). Secara teoritis respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971a). Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh *transfer* atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*flypaper effect*).

Holtz-Eakin et al., (1985), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymetric*.

Gamkhar & Oates (1996) menganalisis respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Studi Holtz-Eakin et al., (1994) menganalisis model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui model, dimana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumberdaya secara permanen, bukan ketersediaan yang sifatnya temporer. Mereka menemukan bahwa semua *current*

spending ditentukan oleh *current resources*. Studi Holtz-Eakin et al., (1985) menemukan bahwa *grants* tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2003), DAU berpengaruh terhadap belanja daerah di Jawa-Bali baik dengan maupun tanpa *lag*; Prakoso (2004), DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Jawa Tengah dan DIY, Maimunah (2004) DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatra dan ada pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi belanja daerah periode ke depan; Sulistiawan (2005) DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, Darwanto (2007), DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Jawa – Bali, penelitian Situngkir (2009) menemukan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. Hasil dari penelitian Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal. Hipotesis untuk menguji DAU dan BD sebagai berikut:

H1a : DAU_t berasosiasi positif dengan BD_t

H1b : DAU_{t-1} mempengaruhi Anggaran BD_t

Sedang hipotesis untuk menguji DAK dan BD sebagai berikut:

H2a : DAK_t berasosiasi positif dengan BD_t

H2b : DAK_{t-1} mempengaruhi Anggaran BD_t

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, Pemda diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002; Adi, 2006). PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif *fluktuatif* dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas, 2003).

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al., 2000; Blackley, 1986; Joulfaiian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; Von Furstenberg et al., 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis* (Aziz et al., 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al., 1986). Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolumbia, Republik Dominika, Honduras dan Paraguay. Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2003), PAD berpengaruh terhadap belanja daerah di Jawa-Bali baik dengan maupun tanpa *lag*; Prakoso (2004), PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Jawa Tengah dan DIY, Maimunah (2006) PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan ada pengaruh *flypaper*

effect dalam memprediksi belanja daerah periode ke depan; Sulistiawan (2005) PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah; Darwanto (2007), PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Jawa – Bali, Situngkir (2009) PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. Hipotesis yang diajukan untuk menguji PAD dan BD sebagai berikut:

H3a : PAD_t berasosiasi positif dengan BD_t

H3b : PAD_{t-1} mempengaruhi Anggaran BD_t

Metode Penelitian

Pengumpulan data dan pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 491 kabupaten/kota. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* :

1. Kabupaten/kota yang mempublikasikan laporan keuangan konsisten tahun 2007-2009
2. Kabupaten/kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2007-2009
3. Kabupaten/kota yang menerima DAU dan DAK dalam tahun 2007-2009.

Yang memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 295. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari dokumen APBD serta laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id, serta dari BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Definisi Operasional variabel

Variabel bebas (*Independent Variable*) dalam penelitian ini yaitu DAU, DAK dan PAD. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Belanja Daerah.

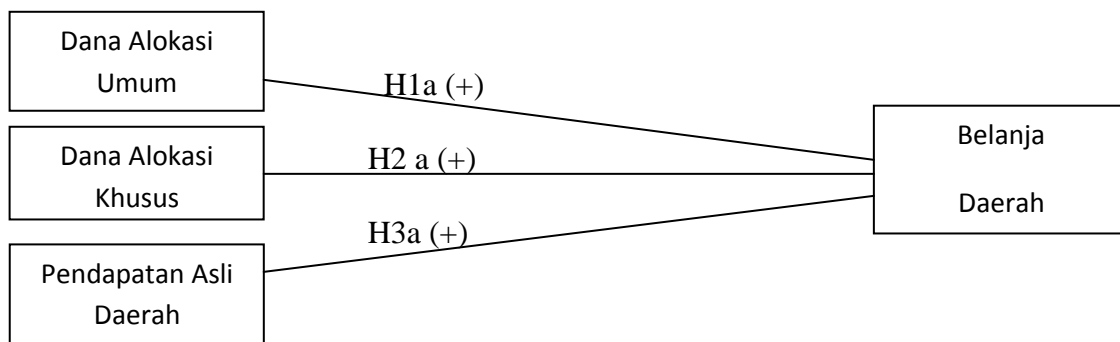
Adapun definisi operasional variabel-variabel bebas dan terikat sebagai berikut:

1. DAU adalah total dana *transfer* yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

2. DAK merupakan alokasi pembiayaan daerah yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
3. PAD adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah.
4. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segala bentuk pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan kepada pemerintah pusat. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.

Model Penelitian

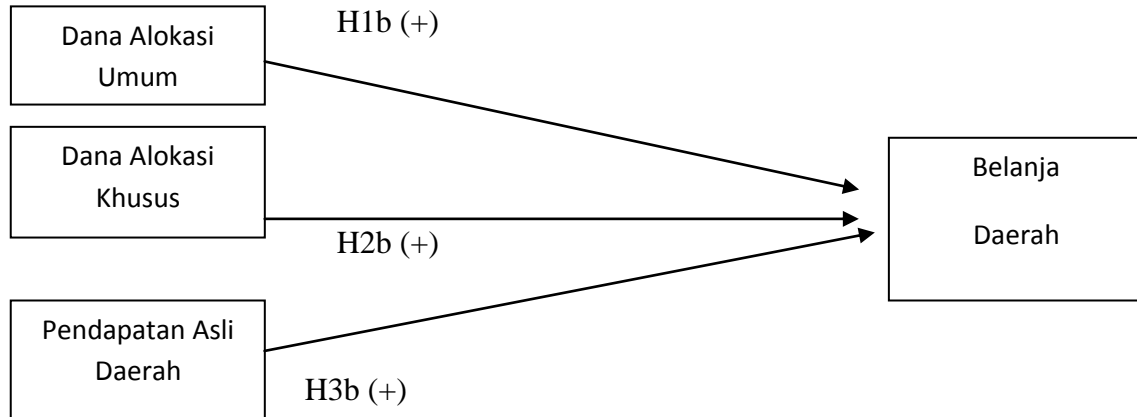
Model penelitian variabel independen berasosiasi dengan variabel dependen sebagai berikut:



Nugraeni - Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)

Model penelitian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan *lag*

1:



Pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut:

- a. Uji hipotesis asosiasi digunakan korelasi Pearson (*Product Moment Pearson*) untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kriteria yang digunakan; nilai $r = 0$ maka H_0 diterima dan jika nilai $r > 0$ maka H_0 ditolak. Persamaannya sebagai berikut:

$$r_{x\text{BJD}} = \frac{\Sigma (X_i \text{ BJD}_t)}{\sqrt{(X_i^2) (\text{BJD}_t^2)}}$$

- b. Uji hipotesis pengaruh digunakan *Simple Regression Analysis & Multiple Regression Analysis*, dengan *lag* 1 tahun untuk mengetahui bahwa DAU, DAK dan PAD tahun sebelumnya mempengaruhi jumlah Belanja Daerah (BJD) tahun berjalan.

- 1) Analisis regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{BJD}_t = b_0 + b_1 X_{1i,2i,3i} + e$$

- 2) Regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

Nugraeni - Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)

$$BJD_t = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + b_3 X_{3i} + e$$

Dimana :

BJD_t = belanja daerah tahun berjalan

b_0 = konstanta

b_1-3 = koefisien regresi

X_i = jumlah DAU_t , DAK_t , PAD_t

X_{1i} = jumlah DAU_{t-1}

X_{2i} = jumlah DAK_{t-1} .

X_{3i} = jumlah PAD_{t-1}

e = error term

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Hipotesis Asosiasi (H1a, H2a dan H3a)

Pengujian untuk melihat hubungan DAU, DAK dan PAD dengan BD tahun berjalan. Yaitu untuk menguji hipotesis bahwa DAU_t , DAK_t dan PAD_t berasosiasi positif dengan BD_t . Hasil korelasi/asosiasi sebagai berikut:

Tabel 1. korelasi variabel independen dengan dependen

Asosiasi	Angka korelasi (r)	Keterangan
DAU_t dengan BD_t	0,669	Asosiasi positif, signifikan
DAK_t dengan BD_t	0,293	Asosiasi positif, signifikan
PAD_t dengan BD_t	0,642	Asosiasi positif, signifikan

Sumber: output SPSS yang diolah

Dari tabel 1. diatas, menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (DAU_t , DAK_t dan PAD_t) berhubungan positif secara signifikan dengan BD_t pada level 0,01. Dari ketiga variabel independen tersebut yang paling kuat hubungannya dengan Belanja Daerah adalah DAU. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah

Kabupaten/Kota dalam menyusun APBD tetap mengandalkan dana *transfer* dari pemerintah pusat yaitu dalam bentuk DAU.

Uji Hipotesis Regresi Parsial (H1b, H2b dan H3b)

Pengujian dilakukan dengan regresi dengan *lag* 1 tahun, dimaksudkan untuk menguji apakah DAU_{t-1} , DAK_{t-1} dan PAD_{t-1} dapat memprediksi BD_t . Hasil pengujian seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.501E8	26109764.710		13.407	.000		
	DAU _{t-1}	.394	.078	.197	5.081	.000	.681	1.469
	DAK _{t-1}	.111	.062	.062	1.786	.075	.840	1.190
	PAD _{t-1}	2.335	.388	.488	6.019	.000	.156	6.425

Sumber: output SPSS

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diasumsikan dalam model semua signifikan mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah tahun berikutnya.

Uji Hipotesis Regresi secara simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Tabel 3. Pengujian Hipotesis regresi secara simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.664E19	5	5.328E18	137.815	.000 ^a
	Residual	1.117E19	289	3.866E16		
	Total	3.781E19	294			

a. Predictors: (Constant), DAK 2008, DAU 2008, PAD 2008

b. Dependent Variable: Anggaran BD 2009

sumber: Output SPSS

Tabel. 3 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti secara simultan seluruh variabel independen DAU_{t-1} , DAK_{t-1} dan PAD_{t-1} dapat memprediksi BD_t .

Kesimpulan Dan Keterbatasan

Kesimpulan

DAU, DAK dan PAD berasosiasi dengan Belanja Daerah. Sedangkan DAU_{t-1} , DAK_{t-1} dan PAD_{t-1} berpengaruh terhadap BD_t dengan lag 1 tahun. Hasil ini membuktikan bahwa DAU, DAK dan PAD merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan studi ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data dua tahun (2008 dan 2009), sehingga belum bisa dilakukan analisis yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang lebih panjang misal 5 atau 10 tahun.
2. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Anggaran dan Realisasi APBD. Proksi perilaku pengalokasian sumberdaya oleh *agents* atau politisi daerah belum tergambar dengan baik. Penelitian kedepan bisa menggunakan

*Nugraeni - Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*

eksperimen (dengan subyek *eksekutif* dan *legislatif* daerah), kemungkinan dapat mengungkapkan bagaimana perilaku politisi daerah dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki daerah.

3. Analisis dalam studi ini menggunakan data *cross-section*, yakni data tahun 2008 dan 2009. Untuk penelitian berikutnya bisa digunakan data runtun waktu (*time series*).

DAFTAR PUSTAKA

-, UU No. 34 Tahun 2000, “Tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
-, UU No. 17 Tahun 2003, “Tentang Keuangan Negara”.
-, UU No. 32 Tahun 2004, “Tentang Pemerintah Daerah”, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
-, UU No. 33 Tahun 2004, “Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, 2003, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Bali”, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, hal.1140-1159.
- Adi Priyo Hari, 2006, “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali”, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Aeburge, Rolf & Audun Langorgen, 1997, “Fiscal and spending behavior of local government: An Empirical analysis based on Norwegian data”, Statistic Norway, Discussion paper no. 196.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini & M. Azali, 2000, “The causal relationship between tax revenues and government spending in Malaysia”, University Putra Malaysia, Working Paper.
- BAPPENAS, 2003, “Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah” Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Blackley, P, 1986, “Causality between revenues and expenditures and the size federal budget”, Public Finance Quarterly 14: 139-156.
- Bradford, D & Oates, W, 1971a, “The analysis of revenue sharing in a new approach to collective fiscal decision”, Quarterly Journal of Economics 83 (3).

*Nugraeni - Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*

- Cheng, Benjamin S, 1999, "Causality between taxes and expenditure: Evidence from Latin American Countries", *Journal of Economics and Finance* 23 (2) : 184-192.
- Darwanto, Yulia Yustikasari, 2007, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Deller, Steven, Craig Maher & Victor Liedo, 2002, "Winconsin local government state shared revenues and the illusive flypaper effect", University of Winconsin-Madison, Working Paper.
- Doi, Takero, 1998, "Is Japanese local finance centralized ? From viewpoint of the revenue-expenditure nexus", University of Tokyo, Working Paper.
- Duwi Priyatno, 2009, "5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17", Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Friedman, M, 1978, "The limitation of tax limitation", *Policy Review* 5 (summer): 7-14.
- Gamkhar, Shama & Oates Wallace, 1996, "Asymetries in the response to increase and decrease in governmental grant : Some empirical findings", *National tax Journal* 49 (4): 501-512.
- Ghozali, Imam, 2005, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS", Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdul, 2008, "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah", Edisi 3, Penerbit Salemba Empat.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S Rosen & Schuyler Tilly, 1994, "Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and test", *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.
- Hoover, Kevin D & Steven M Sheffrin, 1992, "Causation, spending, and taxes: Sand in the Sandbox or tax collector for the welfare state?", *The American Economics Review* 82 (1): 225-248.

<http://robbyalexandersirait.wordpress.com>

- Joulfaian, D & R. Mookerjee, 1990, "The intertemporal relationship between state and local government revenues and expenditures: Evidence from OECD countries", *Public Finance* 45: 109-117.

*Nugraeni - Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, "Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang", Penerbit Erlangga.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas, 2001, "Non linier and Asymetric adjustment in the local revenue-expenditure models: Some evidence from the Italian municipalities", University of Milan, Working Paper.
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, "Akuntansi Sektor Publik", Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara, 2006, "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera", Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Oates, Wallace E, 1995, "Comment on Conflict and Dillemas of Decentralization by Rudolf Holmes", The World Bank Research Observer, hal: 351-353.
- Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prakosa Kesit Bambang, 2004, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah, Studi di Wilayah Propinsi Jawa Tengan dan DIY", JAAI, Volume 8, No. 2, hal 101-118
- Setianingrum, Nugrahani, 2005, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah beserta Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Blora tahun 2000-2004", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro, 2002, "Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah", Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sidik, Machfud, 2002, "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah", Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002, Orasi Ilmiah.

Situngkir, Anggiat, 2009, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Anggaran Belanja Modal: Studi di Kabupaten/Kota Sumatra Utara”, Tesis S2, USU Medan.

Sulistiawan, 2005, “ Pengaruh DAU, PAD terhadap Belanja Pemerintah”.

Sulistyowati, Diah, 2011, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal, studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”, Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang.

Suranta, Sri dan Muhammad Syafiqurrahman, 2005, “Eksistensi Pajak Daerah melalui Pajak Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Surakarta”, *Empirika* Vol 18 No 1, Juni.

Von Furstenberg, George M,R. Jeffery Green & Jin-Ho Jeong, 1986, ”Tax and spend, or spend and tax?”, *The review of Economics and statistic* 67: 33-40.

www.bps.go.id

www.depkeu.djpk.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nugraeni, SE, M.Sc
2. Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 22 Januari 1972
3. Pendidikan :
- S2 Akuntansi UGM th 2011
 - S1 Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta th 1995
 - D3 Akuntansi STIE YKP Yogyakarta th 1993
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Pekerjaan : Dosen DPK pada FE UMB Y
7. Golongan/Pangkat/NIP : III A / Penata Muda / 197201222005012001
8. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
9. Alamat : Patukan RT/RW 07/22 Ambarketawang
Gamping Sleman
10. Penelitian yang dilakukan :
- Inflasi Akibat Kenaikan BBM dan TDL, Jurnal Ilmiah ASET STIE Widya Manggala Semarang, Vol 5, No. 1, Februari 2003.
 - Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Akuntan Pendidik (Dosen Akuntansi) di Perguruan Tinggi Swasta DIY, Jurnal Ilmiah FORDEMA FE Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol.4, No.2, November 2004.
 - Pengaruh Ability and Effort, Intellectual Skills, Prestasi Selain akuntansi, Motivasi dan Prestasi di SMP Terhadap Prestasi Siswa SMA Swasta di Yogyakarta, Jurnal Ilmiah ASET STIE Widya Manggala Semarang, Vol.8, No. 1, Februari 2006.

*Nugraeni - Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*

- Pengaruh Unsur-unsur Sistem Pendidikan Akuntansi Terhadap Kinerja Mahasiswa Akuntansi PTS di Yogyakarta, Agustus 2006 (belum dipublikasikan)
- Pengaruh Budaya Organisasi dan Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan atas Kas pada BMT di Yogyakarta, Desember 2008 (belum dipublikasikan)
- Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Penggajian dan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dalam rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas pada LSM Muslim Aid Yogyakarta, Juli 2009.
- Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia), Maret 2011